

**ANALISIS STRUKTUR DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN MERAUKE**

Rheinhard Lumban Batu

Thobby Wakarmamu

Transna Putra Urip S

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur PAD di Pemerintah Kabupaten Merauke dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Merauke belum memadai. Hal ini terlihat dari pajak parkir yang belum pernah dipungut, belum semua restoran atau rumah makan yang dikenai pajak restoran sesuai ketentuan, penggunaan mesin Cash Register belum maksimal dan penyesuaian tarif retribusi belum dilakukan serta perlu adanya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan PAD.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Intensifikasi, Ekstensifikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arnold Wondiwoi, Yundy Hafizrianda, dan Flora Yvonne de Quelyoe. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal Di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 2, Agustus 2017;
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran (2010) Nomor 32.A/LHP/XIX.JYP/09/2011. Jayapura: BPK RI;
- Boy Denny P. Simamora, Ida Ayu Purba Riani, dan P. N. Patinggi. (2017). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Derajat Kemadirian Fiskal Kabupaten Merauke. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume IV No. 3, Desember 2017;
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah – Praktek-prakte Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI Press;
- Gaffar, A. (2000). Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang. *Wacana*, Edisi 5, Tahun II: 31-46;
- Hirawan, B. (2000). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggapan Terhadap Apresiasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi. *Usahawan*, Tahun XXIX, Nomor 04:3-13;
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M.W.S.T. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Kaho, Y.R. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Mahi, R. (2000). *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*. Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXIX, No.1: 54-56;
- Pemerintah Kabupaten Merauke. (2011). *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Merauke: Sekretariat Daerah;
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang No.18 Tahun (1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara;
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No.22 Tahun (1999) tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara;
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang No.9 Tahun (2015) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun (2014) tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara;
- Samso, A. (1997). *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Utama Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Temu Alumni dan Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta;
- Slater, R. (1997). *Approaches to Strengthening Local Government: Lessons from Srilanka*. *Public Administration and Development* Vol.17: 251-265;
- Urip S., T.P., (2016). Analisis Potensi Aset Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura : Studi Kasus Potensi Pasar dan Terminal. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Vol.1: 1-25. Jayapura;
- Widayat, W. (1994). Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN*, Vol.6: 23-47. Yogyakarta.